

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmatnya Proporsal dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) tingkat Propinsi Tahun 2018 bisa kami selesaikan dengan baik.

Inovasi dalam bentuk aplikasi Open Data kontrak ini merupakan penerapan keterbukaan dokumen kontrak dalam bentuk aplikasi online secara terpadu. Aplikasi Open data Kontrak mewadahi semua data atau dokumen kontrak mulai dari perencanaan program / kegiatan, penganggaran, proses pengadaan barang/ jasa dan pelaporan yang di publikasikan kepada umum ? public secara cepat, tepat, akuntable dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sangat disadari bahwa inovasi aplikasi masih ada kekurangan namun kami akan berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga inovasi bisa menjadi nilai tambah terhadap keterbukaan pelayanan publik kusus terkait open data kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, Juli 2018

Tim Penulis

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH BOJONEGORO
OPEN DATA KONTRAK

A. RINGKASAN PROPORSAL

Praktek-praktek korupsi/kolusi/nepotisme cenderung banyak terjadi pada sector pengadaan barang/jasa, hal ini umumnya karena tingginya intervensi kepentingan politik. Selain itu tidak adanya sarana yang mendukung untuk terlibatnya kontrol social dari masyarakat.

Dari latar belakang tersebut muncullah gagasan/inovasi “Aplikasi Open Data Kontrak yaitu suatu konsep yang menghubungkan Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Bisnis yang sifatnya terbuka dan proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa bisa dipantau. Dengan adanya Open Data Kontrak ini diharapkan memberi nilai ekonomis bagi Pemerintah, Mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Layanan pengadaan lebih baik dan lebih berkualitas serta menciptakan persaingan yang lebih adil terutama perusahaan kecil.

B. ANALISIS MASALAH

1. Masalah apa yang dialami

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyajikan keterbukaan informasi, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif dan inovatif. Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai *pilot project Open Government Partnership (OGP) Sub-National level*, menyejajarkan daerah tersebut dengan kota-kota besar di dunia, seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Buenos Aires (Argentina), Jalisco (Meksiko), dan Sao Paolo (Brazil). Kedudukan tersebut menunjukkan Bojonegoro memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan tata kelola pemerintah daerah.

Tantangan untuk merealisasikan komitmen Bojonegoro tersebut tidaklah ringan. Berbagai ujian masih menghadang dan wajib diatasi. Ujian pertama, muncul dari tantangan masih adanya praktek-praktek korupsi dilingkungan pemerintahan daerah. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus-kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2015 dan 2017 terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa; sebesar 70% dan 42% kasus. Ujian kedua, masih terjadi kebiasaan praktek mark-up atau mark-down terhadap nilai dan spesifikasi barang dalam proyek-proyek pembangunan daerah. Akibatnya, masih ditemukan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak sebelum batas waktu perkiraannya.

Tingginya intervensi kepentingan politik dari kalangan partai politik atau politisi DPRD dalam penentuan pemenang tender dan nilai belanja proyek menjadi ujian ketiga dari implementasi komitmen Kabupaten Bojonegoro. Absennya proses yang transparan dan terbuka menjadi ladang subur kolusi dan menghambat proses pengadaan yang akuntabel. Dan, ujian terakhir, adalah keterbatasan pejabat pengawas dan pejabat verifikator pemerintah daerah dalam mengawasi dan menyeleksi proses tender, sehingga masih terjadi vendor/penyedia barang/jasa yang kurang berkualitas atau bahkan bermasalah masih tetap bisa mengikuti proses tender pemerintah daerah.

C. PENDEKATAN STRATEGIS

1. Siapa yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Bojonegoro No. 33 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Guna mengoptimalkan kebijakan Open Dokumen Kontrak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat aplikasi sistem pusat informasi yang dapat memuat seluruh proses tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah kabupaten Bojonegoro secara holistik melalui pendekatan interoperabilitas data; mulai tahap perencanaan, penganggaran, lelang, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan.

Pembuatan platform/aplikasi ini dimaksudkan agar publik dapat mendapatkan informasi secara utuh dari seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengimplementasi *Open Dokumen Contract* yang berbasis *Open Contract Data Standart* (OCDS) dan juga membuat sistem aplikasi yang dapat men-ghubungkan (inter-operabilty) dari seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah kabupaten Bojonegoro dari berbagai aplikasi yang telah ada (e-musrenbang, SIMDA, SiRUP dan e-Monev/e-Reporting).

Sasaran strategis dalam pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Pimpinan Daerah perlu mendorong Pimpinan SKPD agar mau berbagi data dan menyediakan data dengan format Open Data.
- 2) Mendorong Pimpinan SKPD peng-guna aplikasi e-Musrenbang, SIMDA dan e-Monev untuk menyediakan akses API/Web Service.
- 3) Mempertemukan programmer/pemi-lik API dengan programmer yang mem-buat aplikasi baru yang akan di hubung-kan secara otomatis (inter-operabilty).

- 4) Mendorong Pimpinan SKPD pengembang/pemilik aplikasi-aplikasi yang platformnya belum support inter-operability, agar menyesuaikan platform yang telah siap interoperabilitas data.

2. Dalam Hal Apa Inisiatif ini Kreatif dan Inovatif?

Open Dokumen Kontrak merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan keterbukaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk mendorong “budaya global keterbukaan pemerintah yang memberdayakan dan melayani warga serta mengedepankan cita-cita pemerintah abad 21 yang terbuka dan partisipatif”. Dalam rangka untuk mewujudkan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, *Open Data Contract* juga menjadi salah satu Rencana Aksi (Renaksi) *Open Government partnership* (OGP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016-2017 dan akan dilanjutkan lagi pada periode 2018-2019.

Agar kebijakan *Open Dokumen Contract* ini berjalan maksimal sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan keterlibatan partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan dari seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah, dan menjamin keberlanjutan inovasi aplikasi BOS Kabupaten Bojonegoro, beberapa kebijakan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diantaranya adalah mengintegrasikan data-data paket pekerjaan di BOS dengan data-data paket pekerjaan di SIRUP. Pengintegrasian ini direncanakan akan dilakukan di akhir Tahun 2018.

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

1. Bagaimana strategi ini dilaksanakan

Pembuatan dan pelaksanaan aplikasi *Open Data Contract* ini menggunakan pendekatan Interoperabilitas data, merupakan sistem pendekatan terbaru yang secara teknis dapat memungkinkan pertukaran data atau informasi dari dua atau lebih suatu sistem aplikasi. Interoperabilitas tidak memerlukan penyamaan platform perangkat keras atau perangkat lunak, semisal dengan operating system tertentu. Pembuatan aplikasi Open Dokumen Kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara praktis, efektif dan efisien.

Pengoptimalisasian kebijakan yang ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan kelompok masyarakat sipil, yaitu Bojonegoro Institute, HIVOS, dan Ford Foundation, membangun sistem informasi berbasis aplikasi, dengan nama BOS atau *Bojonegoro Open System*. Aplikasi BOS tersebut telah tersedia lima komponen yang menjadi materi muatannya. Kelima komponen tersebut menunjukkan adanya lima tahapan dalam proses internal aplikasi BOS adalah:

1. Komponen Perencanaan; bagian ini berisi informasi terkait perencanaan paket pekerjaan, mulai dari nama program/kegiatan/paket pekerjaan, nilai paket pekerjaan, nama pejabat PPK, sampai dengan dokumen-dokumen, seperti KAK perencanaan, HPS, dan studi kelayakan.
2. Komponen Pemilihan Penyedia; bagian ini bermuatan atas informasi terkait penyedia barang dan jasa, seperti nama peserta lelang, metode pengadaan barang dan jasa, dan dokumen terkait pemilihan penyedia, seperti berita acara lelang dan pengumuman pemilihan penyedia.
3. Komponen Pemenang; pada bagian ini berisi informasi terkait pemenang lelang, seperti nilai hasil akhir lelang, nama pemenang, tanggal kontrak, dan berita acara penunjukan penyedia barang dan jasa.

4. Komponen Kontrak; bagian ini terdiri dari informasi terkait dokumen kontrak, seperti nomor dokumen, nama dokumen, tanggal mulai, tanggal selesai, dan dokumen terkait kontrak, seperti jaminan pelaksanaan, dokumen jaminan pembayaran, dan dokumen kontrak.
5. Komponen Implementasi; bagian ini berisikan informasi terkait pengimplementasian paket pekerjaan, seperti informasi pembayaran, foto pengerjaan paket pekerjaan, dan dokumen-dokumen, terkait implementasi paket pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Langkah awal OPD menyediakan Dokumen pendukung terkait Open Data Kontrak secara manual dan masyarakat yang menginginkan bisa melihatnya di OPD terkait. Sebagai langkah awal telah diluncurkannya Aplikasi BOS pada bulan Februari 2018, bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, yang dihadiri oleh Bupati, perwakilan dari dinas terkait, NGO, aparat desa, dan warga masyarakat. Sejak diluncurkan sampai sekarang, bulan Juli 2018 telah tersedia 2.988 paket pekerjaan yang sudah diupload oleh 74 OPD.

Pada Maret 2018, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis pertama, yang dihadiri dan dipandu oleh Bojonegoro Institute, Asisten 1 Setda, Bagian Pembangunan Setda, Bappeda, Kominfo, para Admin atau kepala OPD, dan didampingi oleh programmer dari aplikasi BOS tersebut. Bimtek itu membimbing dan mendampingi admin tiap OPD dalam mempelajari tata cara *inputing* data paket pekerjaan ke dalam BOS. Di April 2018, diselenggarakan lagi acara Bimbingan Teknis kedua, yang bertujuan untuk pemantapan admin BOS pada tiap OPD dalam proses *inputing* data, dan sebagai sarana tanya jawab jika ada kendala terkait proses *inputing* data di BOS.

2. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan

Pembentukan awal dari terbentuknya program Open Data Kontrak yang berbasis pada aplikasi BOS (*Bojonegoro Open System*) yaitu dengan kerjasama multi aktor dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi;
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bagian Pembangunan Daerah yang berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil;
3. Bojonegoro Institute, HIVOS, dan Ford Foundation.

Hal ini sebagaimana tujuan awal untuk membangun sistem informasi berbasis aplikasi yang dapat dipantau oleh publik. Kerjasama multi aktor ini sebagai upaya perwujudan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah dalam memonitoring pengadaan barang dan jasa di Bojonegoro.

3. Sumber Daya Apa Saja yang Digunakan untuk Inisiatif ini dan Bagaimana Sumber Daya itu Dimobilisasi.

Pelaksanaan *Open Data Contract* dalam aplikasi BOS (*Bojonegoro Open Sistem*) dilakukan melalui komitmen antara Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bojonegoro Institute. Sedangkan Sumber daya keuangan program ini dibiayai oleh Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dinas Komunikasi dan Informasi dan Bojonegoro Institute yang bekerja sama dengan Sinargantara.

Secara teknis program ini diaplikasikan dalam bentuk BOS (*Bojonegoro Open System*) yaitu sebuah aplikasi yang menampilkan seluruh dokumen kontrak baik yang melalui proses penunjukkan ataupun lelang di masing-masing OPD. Proses penginputan oleh ini menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 2 dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan. Kemudian dalam aplikasi BOS dijabarkan menjadi tahapan

perencanaan pengadaan, tender, kontrak, pelaksanaan dan laporan proyek pembangunan.

4. Apa saja keluaran (*output*) yang paling berhasil

Terdapat keluaran / output dari inovasi Open Data Kontrak antara lain adalah :

1. Open data kontrak bisa memberi kepastian pada masyarakat, bahwa uang rakyat disalurkan untuk mengatasi problem rakyat. Sehingga rakyat mengetahui uang mereka sebenarnya digunakan untuk kepentingan mereka.
2. Menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki prioritas yang sesuai dengan fungsinya dan bisa dicek atau ditelusuri akuntabilitasnya untuk apa *policy* itu dibuat.
3. Memastikan kompetisi ini fair atau adil, sehingga kita bisa mencegah kecurangan.
4. Fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengecek setiap proyek yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terlihat secara gamblang asal sumberdana, berapa jumlahnya dan untuk apa hasilnya bisa dilihat melalui aplikasi ini.
5. Memudahkan auditor (BPK) untuk mengecek penggunaan dana. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi korupsi. Jadi setiap OPD tidak bisa lempar tanggung jawab apabila terjadi masalah, karena semua informasi sudah tersedia, semuanya kita buka. Mulai dari sistem lelang yang digunakan, siapa yang menang lelang, siapa yang melaksanakan/siapa yang menjalankan dan mengawasi.

5. Sistem apa yang digunakan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan

Pemantauan pelaksanaan aplikasi open data kontrak dilakukan dengan cara membuat rekapan terkait data input aplikasi BOS. apakah SKPD dalam menginputkan informasi paket pekerjaan itu sesuai atau tidak. dan jika ada SKPD yang dalam proses inputing itu terkesan tidak sesuai, maka Bojonegoro Institute selaku perwakilan dari masyarakat sipil atau pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi open data kontrak ini akan melakukan konfirmasi terkait proses inputing yang kurang sesuai, misal kemarin ada suatu SKPD yang melakukan proses inputing yang tidak masuk akal dimana nilai dari paket pekerjaan lebih dari 2 Milyar. BI selaku pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi langsung melakukan konfirmasi terkait proses inputing ke SKPD terkait.

Dalam bimtek kedua yang dilaksanakan pada bulan April kemarin juga selain sebagai sarana pemantapan dalam pemahaman proses inputing BOS juga menjadi tempat dalam mengevaluasi kinerja para admin SKPD dalam proses inputing ke aplikasi BOS, dalam bimtek kedua kemarin juga ditunjukkan 10 besar SKPD terbaik dalam proses inputing BOS dalam bentuk grafik yang di dapat dari monitoring proses inputing BOS.

6. Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi

Dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik sebagai bentuk peningkatan kapasitas kinerja Pemkab Bojonegoro menuju *Good Government*. kendala yang dialami di lapangan tentu beragam, tetapi kendala-kendala yang terjadi tersebut tidak dipandang sebagai suatu kegagalan dalam mewujudkannya. Namun dalam tantangan ataupun kendala tersebut digunakan sebagai suatu peluang untuk menjadikan inovasi pelayanan terhadap

masyarakat semakin maksimal diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peluang yang muncul dari kendala untuk berkreasi dan berinovasi untuk kepentingan masyarakat, maka lahirlah inisiatif program **“Open Data Kontrak”**. Dalam pelaksanaan program Open Data Kontrak ini diimplementasikan lewat aplikasi Bojonegoro Open System. Sebagai suatu aplikasi yang berbasis online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga terdapat berbagai kendala dalam hal teknis dari user ataupun dari pengelola perangkat daerah yang menjalankannya.

Adapun kendala, hambatan, atau tantangan yang terjadi pada program open data kontrak ini adalah :

- Kendala pertama datang dari aplikasinya dimana aplikasi Open Data Kontrak ini masih banyak kekurangan mulai dari akses sistem yang lambat karena banyaknya data di sistem, dan masih perlu pengembangan lagi.

Alternatif pemecahannya :

Akan dilakukannya pengembangan aplikasi BOS untuk interoperability dengan sistem lain, dan dilakukannya perbaikan sistem sebagai penyempurnaan dari aplikasi BOS.

- Masih minimnya keingintahuan masyarakat tentang kontrak yang dilakukan antara Vendor dengan Pemerintah.

Alternatif Pemecahannya adalah :

Bojonegoro institute akan melatih relawan untuk mengkampanyekan Open Data Kontrak di masyarakat khususnya pedesaan, sehingga Open Data Kontrak tidak lagi menjadi isu-isu para elit, melainkan bisa juga menjadi isu-isu masyarakat pedesaan.

- Dalam pelaksanaannya pada bulan pertama masih ada beberapa *Admint* SKPD yang masih bingung terkait proses penginputan di dalam aplikasi BOS

Alternatif Pemecahannya adalah :

Diadakannya bimtek untuk pementapan dan pemahaman SKPD terkait proses inputing di aplikasi BOS.

Adanya pendampingan dari pengembang aplikasi via Whatsapp jika ada hal yang tidak dimengerti.

D. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

1. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini

Sebelum adanya aplikasi *Open Data Contract*, warga masyarakat tidak memperoleh informasi yang maksimal tentang proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Ketiadaan informasi tersebut masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui papan pengumuman yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong adanya keleluasaan bagi pihak penyelenggara (birokrat, Pemerintah Kabupaten) untuk berkolusi dan melakukan korupsi, bersama-sama dengan pihak penyedia (kontraktor, perusahaan pemenang tender).

Sesudah adanya aplikasi *Open Data Contract*, warga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi, terutama dalam pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungannya.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan yang terjadi antara waktu sebelum dan sesudah adanya inovasi *Open Data Contract*.

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1.	Partisipasi Publik.	Partisipasi publik rendah, dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa.	Partisipasi publik meningkat, dalam mengawasi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di daerahnya.

2.	Kualitas dari hasil pengadaan barang dan jasa.	Tidak ada tahap yang dapat dikontrol oleh public.	Setiap tahap dapat dipantau oleh publik mulai dari perencanaan, pelelangan, pemenang, hingga tahap implementasi proyek.
3.	Kualitas dari pelaksanaan proyek.	Sulit dilakukan kontrol terhadap kualitas proyek.	Kontrol dapat dilakukan terhadap proyek, seiring dengan kemudahan akses informasi publik.
4.	Mal administrasi dan korupsi.	Ketiadaan pengawasan publik memberi peluang bagi penyedia untuk melakukan penipuan dan kolusi.	Peluang mal administrasi dan kolusi mengecil.
5	Persepsi publik.	Menganggap bahwa pengadaan barang dan jasa hanya domain antara penyelenggara dan penyedia	Seluruh informasi pemerintah bersifat terbuka, selain yang dikecualikan.

2. Apakah manfaat ini berkelanjutan dan dapat direplikasi?

Adanya kebijakan keterbukaan dalam pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus dimanfaatkan oleh semua pihak. Utamanya jika dijalankan untuk mewujudkan perubahan kebijakan dan praktik reformasi proses kontrak publik yang mengarah pada perbaikan nyata bagi kehidupan masyarakat. Seperti akses terhadap pe-nyampaian layanan publik dan barang, perawatan kesehatan dan pendidikan berkualitas, jalan yang aman, minum air bersih dan lain sebagainya. Kebijakan Open Data/Dokumen Kontrak yang dicetuskan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan terobosan yang sangat baik, berani dan inspiratif. Jika kebijakan ini dijalankan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak (publik, pelaku usaha, akademisi dan pemerintah sendiri), maka akan semakin memberikan dampak pada percepatan pembangunan di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan otomatis akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.

3. Apa saja pembelajaran yang dapat di petik?

Kegiatan *Open Data Contract* diupayakan agar dapat mencapai peningkatan kualitas pemerintahan daerah dan mutu sumber daya manusia di daerah tersebut. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses kontrol menjadi peningkatan keberdayaan masyarakat itu sendiri.

4. Dokumentasi Kegiatan

a. Dilaksanakan peluncuran aplikasi BOS



b. Bimtek/sosialisasi aplikasi BOS

